

**PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSI  
DI SMP NEGERI 14 BANDAR LAMPUNG  
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**MUTHIA LARASWATI**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSI DI SMP NEGERI 14 BANDAR LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

**Oleh  
Muthia Laraswati**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program pendidikan inklusi di SMP Negeri 14 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Siswa, dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan uji kredibilitas dengan kritik sumber, kritik intern dan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pendidikan inklusi di SMPN 14 Bandar Lampung belum berjalan secara optimal, masalah yang dihadapi baik dari manajemen pembelajaran seperti pengelolaan penerimaan peserta didik, perancangan kurikulum, pengadaan dan pembinaan tenaga pendidik, pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana, pembiayaan, serta lingkungan hubungan sekolah dan masyarakat. Semua unsur yang mendukung terlaksananya pendidikan inklusi sangat diperlukan agar sistem berjalan dengan baik.

**Kata kunci : pendidikan, inklusi, anak berkebutuhan khusus**

**PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSI  
DI SMP NEGERI 14 BANDAR LAMPUNG  
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

Oleh

*MUTHIA LARASWATI*

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN  
INKLUSI DI SMP NEGERI 14 BANDAR LAMPUNG  
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

Nama Mahasiswa : **Muthia Laraswati**

No. Pokok Mahasiswa : 1213032091

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan



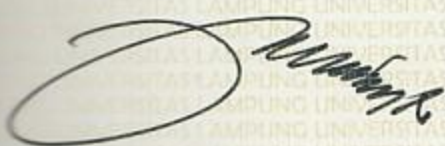
Pembimbing I,


Pembimbing II,

  
**Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**  
NIP 19820727 200604 1 002

  
**Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.**  
NIP 19870602 200812 2 001

## 2. Mengetahui

  
Ketua Jurusan  
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial,

  
Ketua Program Studi  
Pendidikan PKn,

**Drs. Zulkarnain, M.Si.**  
NIP 19600111 198703 1 001

**Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**  
NIP 19820727 200604 1 002

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua : **Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**

Sekretaris : **Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.**

Penguji

Bukan Pembimbing : **Dr. Adelina Hasyim, M.Pd.**

### 2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

**Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum.**

NIP. 19590722 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Agustus 2016

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah, adalah :

Nama : Muthia Laraswati  
NPM : 1213032091  
Prodi/Jurusan : PPKn/Pendidikan IPS  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Alamat : Jalan Pagar Alam Gang Putra 1 Nomor 07 Kelurahan  
Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar  
Lampung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Agustus 2016  
Penulis,



Muthia Laraswati  
NPM 1213032091

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 25 Desember 1992, Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara buah cinta kasih dari pasangan Bapak Muhammad Rum dan Ibu Nurhayati Yusak.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh :

1. TK-Kartika II-25 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 1999
2. SD Negeri 1 Langkapura yang diselesaikan pada tahun 2005
3. SMP Negeri 10 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2008
4. SMA Negeri 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2011

Tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dan tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN, dan melakukan alih program studi pada semester tiga ke Program Studi PPKn Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Pada saat di bangku kuliah, penulis pernah aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di Himpunan Mahasiswa Ilmu Sosial (HIMAPIS).

Sebagai salah satu mata kuliah wajib, penulis pernah mengikuti Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dengan tujuan Jakarta-Bandung-Yogyakarta-Solo pada tanggal 20-26 Januari 2013. Penulis juga telah menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata-Kependidikan Teritegrasi (KKN-KT) di SMA Negeri 1 Kebun Tebu selama 2 (dua) bulan, terhitung sejak bulan Juli sampai September.

Penulis,

Muthia Laraswati



## *PERSEMBAHAN*

*Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji untuk Mu Ya Allah SWT, atas segala kemudahan, limpahan rahmat dan karuniaMU.*

*Dengan Penuh Syukur Kupersembahkan Karya Ini Kepada:*

*Kedua orang tuaku, Mami Papi yang sangat kucintai dan kusayangi,, terimakasih atas kasih sayang, do'a, semangat, dan pengorbanan demi keberhasilanku.*

*Seluruh Dosen yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan aku hingga aku berhasil.*

*Almamater tercinta, Universitas Lampung.*

## *MOTO*

*“Salah satu penemuan terbesar umat manusia adalah bahwa mereka bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya mereka sangka tidak bisa dilakukan”*

*(Henry Ford)*

*“Learn from the past, live for today, and plan for tomorrow”  
Belajarlah dari masa lalu, hiduplah di masa sekarang dan rencanakan untuk hari esok.*

*(Muthia Laraswati)*

## SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusi di SMP Negeri 14 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016”**. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang telah menyumbangkan pemikiran, motivasi, dan waktunya untuk memperlancar penyelesaian skripsi ini terutama kepada Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. selaku ketua program studi PPKn dan pembimbing I, Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing II. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fuad, M.Hum. selaku selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung dan sekaligus Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;

4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
6. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Unila dan selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta motivasi, arahan, dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., selaku pembimbing II, sekaligus pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta motivasi, arahan, dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Ibu Dr. Adelina Hasyim, M.Pd., selaku pembahas I, terima kasih atas saran dan masukannya;
9. Bapak Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd., selaku pembahas II terima kasih atas saran dan masukannya;
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan, saran, masukan serta segala bantuan yang diberikan:

11. Kedua orang tuaku tercinta, kedua kakakku dan seluruh keluarga besarku terima kasih atas doa, dukungan, kasih sayang yang telah diberikan dan semua pengorbanan kalian untukku yang tidak ternilai dari segi apapun;
12. Harry Alfikrie, S.T., yang selalu bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu, mendampingi serta memberikan motivasi;
13. Sahabat sejak zaman di bangku sekolah Sherly Dwi S dan Yanny Octaviany;
14. Sahabat terbaikku (Elly Sukmawati, Evi Yunita, Indah Permata, Lovina Aura, Tri Ardila, Nindya Hangesti, Ardila Desga, Yolanda Regina, Maria Desti, Antonius Sm, Bayu A, Hasven Stamadova, Iqbal Haries, Putra) terima kasih kalian selalu membantu di masa-masa sulitku, menemani dikala sedih maupun bahagia, serta semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan masukan, motivasi dan dukungannya;
15. Teman-teman seperjuanganku di Prodi PPKn angkatan 2012 baik ganjil maupun genap yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan yang kalian berikan;
16. Teman-teman KKN dan PPL (Eka Diyasmi, Eka Fitri, Indrawan, Putri, Fatim, Reni, Reza, Suci, Tiara) terima kasih atas saran, serta motivasinya yang selalu kalian berikan kepadaku;
17. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Akhirnya penulis berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, Agustus 2016  
Penulis

Muthia Laraswati  
NPM 1213032091

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>

### **I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	11
C. Perumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
1. Tujuan Penelitian .....	12
2. Kegunaan Penelitian .....	12
a. Kegunaan Teoritis .....	12
b. Kegunaan Praktis .....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	13
1. Ruang Lingkup Ilmu .....	13
2. Subjek Penelitian .....	13
3. Objek Penelitian .....	13
4. Wilayah Penelian .....	14
5. Waktu Penelitian.....	14

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

A. Deskripsi Teori .....	15
1. Pelaksanaan Program .....	15

a. Pengertian Pelaksanaan.....	15
b. Pengertian Program.....	16
2. Pendidikan Inklusi .....	18
a. Kebijakan dan Program Sekolah Pendidikan Inklusi .....	18
b. Pengertian Pendidikan Inklusi .....	21
c. Perbedaan Pendidikan Segregasi, Terpadu dan Inklusi .....	25
d. Pelaksanaan Manajemen Sekolah Inklusif .....	28
e. Tujuan dan Landasan Pendidikan Inklusi .....	34
1) Tujuan Pendidikan Inklusi .....	34
2) Landasan Pendidikan Inklusi .....	38
f. Teori Belajar .....	39
3. Efektivitas Pembelajaran.....	46
a. Pengertian Efektivitas .....	46
b. Ciri-ciri Efektivitas Pembelajaran .....	47
c. Kriteria Efektivitas Pembelajaran .....	48
d. Konsep Pembelajaran yang Efektif .....	50
B. Kerangka Pikir .....	52
C. Kajian Penelitian yang relevan .....	55

### **III. METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	57
B. Subjek Penelitian atau Informan .....	59
C. Instrumen Penelitian .....	59
D. Teknik Pengumpulan Data .....	60
1. Observasi .....	60
2. Wawancara .....	60
3. Dokumentasi .....	61
E. Uji Kredibilitas .....	61
1. Kritik Sumber .....	61
a. Kritik Intern .....	62
b. Kritik Ekstern .....	62
2. Triangulasi.....	62
F. Teknik Pengolahan Data .....	63
G. Teknik Analisis Data.....	64
H. Tahapan Penelitian.....	65

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Tahapan Penelitian.....	67
1. Pengajuan Judul .....	67
2. Penelitian Pendahuluan.....	67
3. Pengajuan Rencana Penelitian .....	68



4. Penyusunan Kisi dan Instrumen Penelitian .....	68
5. Pelaksanaan Penelitian .....	69
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	70
C. Deskripsi Data.....	86
D. Uji Kredibilitas Data .....	87
E. Analisis Hasil Penelitian .....	87
F. Paparan Data .....	88
G. Pembahasan .....	95
1. Manajemen Pembelajaran Pendidikan Inklusi .....	95
2. Tenaga Pendidik .....	101
3. Sarana dan Prasarana .....	104
4. Pembiayaan .....	107
5. Lingkungan (Hubungan Sekolah dan Masyarakat) .....	108
H. Keunikan Hasil Penelitian .....	111
<b>I. SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Simpulan .....	113
B. Saran .....	114

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Data Jenis Inklusi di SMP N 14 B.Lampung TP 2015/2016 .....	10
Tabel 4.1 Jadwal Wawancara, Observasi, Dokumentasi .....	70
Tabel 4.2 Data Guru, Staf, dan Siswa SMPN 14 Bandar Lampung .....	72

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Proses Pembelajaran Inklusi.....	34
Gambar 2.2 Skema Kerangka Pikir .....	54
Gambar 3.1 Triangulasi Menurut Denzim .....	63
Gambar 3.2 Teknik Analisis Data .....	65

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Rencana Judul Skripsi .....	120
2. Surat Keterangan Dekan FKIP Unila .....	121
3. Surat Izin Penelitian Pendahuluan .....	122
4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Pendahuluan .....	123
5. Surat Izin Penelitian .....	124
6. Surat Telah Melaksanakan Penelitian .....	125
7. Kisi-Kisi Wawancara .....	126
8. Kisi-Kisi Observasi .....	132
9. Kisi-Kisi Dokumentasi .....	133
10. Instrumen Wawancara .....	134
11. Instrumen Observasi .....	149
12. Instrumen Dokumentasi .....	150
13. Instrumen Identifikasi dan Asesmen ABK .....	152
14. Data Guru dan Staf TU SMPN 14 Bandar Lampung .....	159
15. Data Siswa SMPN 14 Bandar Lampung .....	160
16. Struktur Organisasi Perpustakaan SMPN 14 Bandar Lampung .....	161
17. Struktur Organisasi SMPN 14 Bandar Lampung .....	162
18. Denah Bangunan SMPN 14 Bandar Lampung .....	163
19. Foto Penelitian .....	164

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga Negara, dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan selanjutnya serta merupakan modal dasar bagi pembentukan manusia Indonesia yang berkualitas yang memungkinkan dapat menikmati hidup dan kehidupannya secara mandiri.

Kemandirian dapat diciptakan melalui proses pembelajaran yang memberi kebebasan kepada peserta didik untuk selalu aktif berpendapat dan bertanya, selalu diberi peluang untuk inovatif atau mengkaji sesuatu yang baru, kreatif untuk membuat sesuatu yang baru dari berbagai sumber, menghargai perbedaan pendapat, dan peka terhadap peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Inilah yang disebut *learning how to learn* yaitu pendidikan yang diselenggarakan dengan cara peserta didik belajar bagaimana mereka harus belajar sehingga hasil belajar yang mereka peroleh menjadi lebih bermutu.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Prinsip penyelenggaraan pendidikan yang tercantum pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Karena itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan (*difabel*). Namun sayangnya sistem pendidikan di Indonesia belum mengakomodasi keberagaman, sehingga menyebabkan munculnya segmentasi lembaga pendidikan yang berdasar pada perbedaan agama, etnis, dan bahkan perbedaan baik fisik maupun mental yang dimiliki oleh siswa. Jelas segmentasi lembaga pendidikan ini telah menghambat para siswa untuk dapat belajar menghormati realitas keberagaman dalam masyarakat.

Permasalahan pendidikan di Indonesia tampaknya perlu mendapat perhatian yang serius. Masalah-masalah di lapangan mulai dari pemberantasan buta-huruf, anak putus sekolah, kenakalan remaja, sampai pada peluang untuk

mendapat kesempatan dalam pendidikan (terutama untuk para penyandang disabilitas), dan lain-lain.

Selama ini pendidikan bagi peserta penyandang disabilitas di Indonesia telah diwadahi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa. Pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas ini disediakan dalam tiga jenis lembaga pendidikan, yakni: Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan Terpadu. Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai lembaga pendidikan yang tertua, menampung peserta didik yang jenis kelainannya sama. Contohnya: SLB Tunarungu, SLB Tunagrahita, SLB Tunanetra, SLB Tunadaksa, SLB Tunalaras, dan sebagainya. SDLB menampung berbagai jenis anak yang berkelainan menjadi satu, sehingga dalam satu sekolah atau bahkan satu kelas terdiri dari berbagai macam peserta didik yang berkelainan, misalnya tunarungu, tunadaksa, tunanetra, tunalaras, tunagrahita, dan sebagainya. Adapun Pendidikan terpadu adalah sekolah regular yang menampung anak berkelainan dengan kurikulum, guru, sarana pengajaran, dan kegiatan belajar mengajarnya sama. Namun jenis ini biasanya hanya masih menampung anak tunanetra saja, itu pun terkadang masih banyak sekolah yang keberatan untuk menampungnya. Secara tidak disadari sistem pendidikan SLB telah membangun tembok eksklusifisme bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Akibatnya masyarakat menjadi tidak akrab dengan kelompok difabel.

Dalam perkembangannya kemudian Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional yang

memberikan warna baru dalam penyediaan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas ini. Dalam penjelasannya, pasal 15 dan pasal 32 menyebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Aturan terbaru yang mengatur tentang pendidikan inklusif ini, adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 70 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pendidikan inklusi sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Hal ini tentunya merupakan terobosan bentuk pelayanan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas dengan bentuk penyelenggaraan pendidikan inklusif yang bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif.

Pendidikan inklusi relatif banyak dibuka oleh berbagai lembaga pendidikan di Indonesia, karena semangat pendidikan inklusi memang sangat sesuai dengan filosofi Bangsa yang menyatakan Bhineka Tunggal Ika. Data tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendibud, Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi



berjumlah 814 sekolah dengan jumlah siswa mencapai 15.181 siswa ( dikutip dari Solider).

Dengan demikian pendidikan inklusi masih banyak memerlukan perhatian yang sangat besar dari pemerintah sebagai penyelenggara negara yang bertanggungjawab terhadap pendidikan seperti dimatkan dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 31, yakni:

- Ayat (1): “Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”.
- Ayat (2): “Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Upaya pemerintah untuk melaksanakan pendidikan inklusi ini tuangkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Biasa, UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional tentang pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas, Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan Pendidikan Inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, serta Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas Nomor 380/C.C6/MN/2003, tanggal 20 Januari 2003, Yakni: “Setiap kabupaten/kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif di sekurang-kuranya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, SMK”. Walaupun telah ada usaha pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi melalui Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, bukan berarti semuanya telah selesai.

Pendidikan inklusif pada hakekatnya memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan memahami kesulitan pendidikan yang dialami oleh peserta didik. Namun pendidikan inklusif tidak melihat hambatan tersebut dari sisi anak, melainkan dari sistem pendidikannya sendiri.

Berdasarkan buku pedoman manajemen dan pembelajaran sekolah inklusi yang dikeluarkan oleh Direktorat PSLB tahun 2010, Upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah perlu didukung kemampuan manajerial kepala sekolah, oleh sebab itu seorang kepala sekolah hendaknya berupaya untuk mendayagunakan berbagai sumber baik personal maupun manajerial secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah secara optimal. Manajemen sekolah akan efektif dan efisien apabila didukung oleh :

- Sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah,
- Kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik peserta didik,
- Kemampuan dan task commitment (tanggung jawab terhadap tugas) tenaga kependidikan yang handal,
- Sarana dan prasarana yang memadai yang mendukung kegiatan pembelajaran,
- Dana yang cukup untuk menggaji staf sesuai dengan fungsinya, serta
- Partisipasi masyarakat yang tinggi.

Bila salah satu hal di atas tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka efektivitas dan efisiensi pengelolaan sekolah belum optimal.

Manajemen berbasis sekolah memberikan kewenangan penuh kepada Kepala Sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan suatu sekolah yang meliputi input peserta didik, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana-prasarana, dana, manajemen, lingkungan, dan kegiatan pembelajaran. Peserta didik pada sekolah inklusif sangat bervariasi, dari anak biasa, anak berkebutuhan khusus sampai anak yang tidak beruntung dari sisi sosial, ekonomi maupun kesehatan. Kondisi ini menuntut adanya sistem manajemen sekolah yang fleksibel, akomodatif, komprehensif agar visi-misi dan tujuan sekolah dapat tercapai secara optimal. (Direktorat PSLB : 2010)

Rencana penyelenggaraan pendidikan inklusif yakni sekolah bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di daerah-daerah masih sangat rendah. Menurut Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK) Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud, Mudjito (2013: 9) yang dikutip dari Antaranews.com, "Saat ini jumlah anak berkebutuhan khusus yang telah tertangani dan masuk dalam pendidikan inklusif baru 116.000 anak dari total 300.000 anak, selebihnya masih di bawah asuhan orang tua masing-masing." Beliau juga menambahkan bahwa, "Rancangan pemerintah pada pendidikan khusus sudah menyedot anggaran pendidikan di APBN sebesar 1,9 miliar. Untuk anggaran tiap daerah sebesar Rp900 Juta."

Untuk itu pendidikan inklusi sudah saatnya di terapkan secara menyeluruh di seluruh wilayah Provinsi di Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Lampung, tanpa terkecuali. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada lagi diskriminasi terhadap anak-anak berkebutuhan khusus agar mendapatkan pendidikan yang baik.

Untuk provinsi Lampung pendidikan inklusi dimulai di Kota Metro sejak Dinas Pendidikan Kota tersebut menunjuk 18 sekolah sebagai bentuk usaha penyelenggara pendidikan inklusif. Salah satu sekolah menengah di Kota Bandar Lampung yang menyelenggarakan program pendidikan inklusi adalah SMP Negeri 14 Bandar Lampung. Sekolah tersebut telah menyelenggarakan pendidikan inklusi sejak tahun 2009. Di sekolah tersebut terdapat 59 orang pendidik yang mengajar dari kelas VII sampai dengan kelas IX. Jumlah anak berkebutuhan khusus yang terdaftar di sekolah tersebut dari tahun 2009-2016 adalah 231 orang, diantaranya 133 orang laki-laki dan 98 orang perempuan.

Berdasarkan studi awal yang dilakukan disekolah tersebut, pelaksanaan program pendidikan inklusi belum berjalan secara optimal, masalah yang dihadapi baik dari internal sekolah, orangtua, peserta didik maupun masyarakat. Pelaksanaan program pendidikan inklusi antara lain belum membuat laporan kemajuan belajar peserta didik, hal ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana program tersebut telah terlaksana secara efektif, para guru di SMP 14 Bandar Lampung belum menguasai bagaimana merancang program pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, dari perancangan kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian dalam *setting* pendidikan

inklusi. Belum adanya guru pembimbing khusus (GPK), guru reguler yang ada belum pernah mendapatkan pelatihan untuk menangani peserta didik berkebutuhan khusus, dan pemahaman pihak sekolah pada tingkat penyelenggaraan pendidikan inklusi belum sepenuhnya diketahui.

Semua unsur yang mendukung terlaksananya program pendidikan inklusi sangat diperlukan agar sistem dapat berjalan dengan baik. Unsur-unsur penunjang pendidikan inklusi antara lain adalah pendanaan yang memadai untuk mendukung proses pendidikan inklusi, sarana dan prasarana seperti aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus dan media pembelajaran yang tepat, serta dukungan orangtua siswa baik orangtua anak normal maupun orangtua anak-anak berkebutuhan khusus.

Berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan inklusi, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan terutama dalam melakukan sosialisasi sekolah inklusi. Pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus akan sangat besar pengaruhnya terhadap upaya pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pemahaman dan kepedulian masyarakat akan berimbas positif terhadap peserta didik lainnya yang belajar bersama-sama dengan anak berkebutuhan khusus. Dengan demikian akan terciptanya iklim yang kondusif bagi anak berkebutuhan khusus dan peserta didik lainnya di sekolah inklusi. Tetapi guru maupun kepala sekolah menyadari masih banyak hal yang harus di tingkatkan dan diperbaiki dalam pelaksanaan program pendidikan inklusi agar dapat berjalan dengan efektif.

Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut :

**Tabel 1.1. Data jenis inklusi Tahun Ajaran 2015/2016**

No.	JENIS INKLUSI	KELAS			JUMLAH
		VII	VIII	IX	
1	ABK	-	4	8	12
2	Autis	-	-	1	1
3	Berkesulitan Belajar	-	-	6	6
4	Glukoma Akut/ Low Vision	2	-	1	3
5	Lambat Belajar	2	3	-	5
6	Tuna Daksa	1	-	-	1
7	Tuna Daksa Ringan	-	1	2	3
8	Tuna Ganda	1	-	-	1
9	Tuna Rungu	-	1	1	2
<b>JUMLAH</b>		<b>6</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>34</b>

*Sumber : Bagian Tata Usaha SMP Negeri 14 Bandar Lampung*

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan banyaknya peserta didik inklusi di SMP Negeri 14 Bandar Lampung pada Tahun Pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 34 siswa dengan jenis inklusi yang berbeda-beda, yang tersebar pada kelas VII berjumlah 6 orang, kelas VIII berjumlah 9 orang dan kelas IX berjumlah 19 orang.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini ingin mencoba mengkaji masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan program pendidikan inklusi.

Dalam hal ini, peneliti tertarik dan merasa penting untuk melakukan penelitian mengenai **“Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusi di SMP Negeri 14 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, fokus penelitian ini adalah Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusi di SMP Negeri 14 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016. Maka sub fokus pada penelitian ini adalah:

1. Pengelolaan sekolah terkait penerimaan peserta didik, kurikulum dan proses pembelajaran,
2. Pembinaan dan pengadaan tenaga pendidik,
3. Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana
4. Pembiayaan dari pemerintah pusat maupun daerah,
5. Meningkatkan kepedulian masyarakat terkait penyelenggaraan pendidikan inklusi.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, fokus penelitian dan sub fokus penelitian diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian pada penelitian ini yaitu: Bagaimana pelaksanaan program pendidikan inklusi di SMP Negeri 14 Bandar Lampung?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusi Di SMP Negeri 14 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep teori dan prosedur ilmu pendidikan khususnya PPKn dalam wilayah kajian pendidikan, kewajiban warga negara berbentuk Hak setiap warga negara karena bagaimanapun kewajibannya mendapatkan layanan pendidikan berbentuk program pendidikan inklusi.

#### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Mahasiswa : Penelitian ini bermanfaat sebagai masukan terkait dengan pengaruh program pendidikan inklusi terhadap efektivitas pembelajaran siswa untuk memperkaya referensi terutama yang terkait dengan penelitian tentang program sekolah pendidikan inklusi.
- 2) Sekolah : Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan, dan referensi dalam meningkatkan pemahaman akan



program sekolah penyelenggara pendidikan inklusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat.

- 3) Calon Guru : Penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam memperkaya materi tentang konstitusi sesuai dengan tujuan pendidikan nasional khususnya program pendidikan inklusi di Indonesia.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup Penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Ruang Lingkup Ilmu**

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) wilayah kajian PKn, yang membahas program pendidikan inklusi sebagai bentuk pelayanan pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus.

### **2. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, waka kurikulum, guru, dan peserta didik pada SMP Negeri 14 Bandar Lampung, serta masyarakat.

### **3. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusi di SMP Negeri 14 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.

#### **4. Wilayah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 14 Kota Bandar Lampung yang terletak di Jalan Teuku Cikditiro Beringin Raya Bandar Lampung.

#### **5. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan surat izin penelitian pendahuluan yang dikeluarkan pada tanggal 5 November 2015 No. Surat 7531/UN26/3/PL/2015 oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sampai dengan selesainya penelitian pada tanggal 23 Maret 2016 No.070/828/IV.40/II.14/2016 oleh Kepala SMP Negeri 14 Bandar Lampung.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Deskripsi Teori**

#### **1. Pelaksanaan Program**

##### **a. Pengertian Pelaksanaan**

Menurut Majone dan Wildavsky (dalam skripsi Aldo Perdana Putra: 2014: 10) Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan sebagai evaluasi.

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha - usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat- alat

yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

### **b. Pengertian Program**

Banyak ahli memberikan pengertian tentang konsep program. Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa program adalah “rencana”. demikian program bertujuan keberhasilannya dapat diukur. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan cara dan alat tertentu. Sudjana (2004: 1) berpendapat bahwa program adalah sebagai kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan/organisasi (lembaga) yang memuat komponen-komponen program. Komponen-komponen itu meliputi tujuan, sasaran, isi dan jenis kegiatan, proses kegiatan, waktu, fasilitas, alat, biaya, organisasi penyelenggaraan, dan lain sebagainya.

S. Eko Putro Widoyoko (2010: 8) menyatakan bahwa program diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan seksama dan dalam pelaksanaannya berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang. Dalam pengertian tersebut ada empat pokok unsur dapat dikategorikan sebagai program yaitu:

- a) Kegiatan yang direncanakan atau dirancang dengan seksama, bukan asal rancangan, tetapi rancangan kegiatan yang disusun dengan pemikiran yang cerdas dan cermat.
- b) Kegiatan tersebut berlangsung secara berkelanjutan dari suatu kegiatan ke kegiatan yang lain. Dengan kata lain ada keterkaitan antar-kegiatan sebelum dengan kegiatan sesudahnya.
- c) Kegiatan tersebut berlangsung dalam sebuah organisasi, baik organisasi formal maupun organisasi non formal kegiatan individual.
- d) Kegiatan tersebut dalam implementasi atau pelaksanaannya melibatkan banyak orang, bukan kegiatan yang dilakukan perorangan tanpa ada kaitannya dengan kegiatan orang lain.

Suharsimi Arikunto dan Cepi Safaruddin Abdul Jabar (2009: 4) menyatakan bahwa program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan maka program merupakan sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan. Pelaksanaan program selalu terjadi di dalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan sekelompok orang. Ada tiga pengertian penting dan perlu ditekankan dalam menentukan program, yaitu: 1) realisasi atau implementasi suatu kebijakan; 2) terjadi dalam waktu relatif lama-bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan; dan 3) terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Dari definisi pelaksanaan program di atas dapat di simpulkan bahwa sejauh mana tingkat kemampuan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan program tersebut sesuai dengan fungsinya agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara tepat dan optimal. dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, yaitu dalam pemilihan tujuan yang hendak dicapai, sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

## **2. Pendidikan Inklusi**

### **a. Kebijakan dan Program Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi**

H.A.R. Tilaar & Riant Nugroho (2008: 16) menyebutkan bahwa “konsep mengenai kebijakan merupakan suatu kata benda hasil dari deliberasi mengenai tindakan (behavior) dari seseorang atau sekelompok pakar mengenai rambu-rambu tindakan dari seseorang atau lembaga untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.

Banyak para ahli yang mengemukakan pendapat tentang kebijakan pendidikan. Riant Nugroho (2008: 37) menyatakan bahwa “kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di

bidang pendidikan”. Dengan demikian, kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik dimana konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan Negara bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan Negara bangsa secara keseluruhan. Arif Rohman (2009: 108) mengatakan “kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan”. Sejalan dengan hal tersebut H.A.R. Tilaar & Riant Nugroho (2008: 140) mengatakan bahwa “kebijakan pendidikan adalah keseluruhan dari proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu”.

Dalam merumuskan kebijakan pendidikan pertama kali suatu kebijakan pendidikan yang hendak diwujudkan harus memiliki tujuan (goal) yang jelas sebagaimana diinginkan. Kedua, tujuan yang diinginkan itu harus pula direncanakan (plans) atau harus ada proposal secara matang, yakni pengertian yang spesifik dan oprasional untuk mencapai tujuan. Ketiga, harus ada (program), yaitu upaya dan cara-cara dari yang berwenang untuk mencapai tujuan. Keempat adalah (decision), yaitu segenap tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana,

melaksanakan dan mengevaluasi program. Kelima adalah (effect), yaitu akibat-akibat dari program yang akan dijalankan baik yang diinginkan atau disengaja maupun tidak disengaja, baik yang primer maupun sekunder (Arif Rohman, 2009: 119).

Secara khusus salah satu kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, dalam Peraturan Menteri No. 70 Tahun 2009 adalah pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi yaitu pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Melalui peraturan di atas maka Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan program dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, pasal 6 yang menyatakan bahwa; 1) Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusi sesuai dengan kebutuhan peserta didik; 2) Pemerintah kabupaten/kota menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusi pada satuan pendidikan inklusi; 3) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusi.

Pada tingkat kabupaten/kota juga terdapat peraturan penyelenggaraan pendidikan inklusi yang tertuang pada Peraturan daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan memberikan jaminan terhadap penikmatan hak atas pendidikan terhadap Penyandang Disabilitas dengan dilakukannya program sekolah inklusi.



Berdasarkan data dan informasi dilapangan pemenuhan hak atas pendidikan belum terpenuhi, namun sudah disediakan lembaga pendidikan yakni Sekolah Luar Biasa, PKBM, dan sekolah Inklusi. Beberapa sarana dan prasarana yang belum dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk mengakses pendidikan tersebut seperti belum disiapkannya akses untuk memperoleh pendidikan, kurangnya ruang belajar, buku paket, jauhnya SLB, tenaga profesional, ketidaksiapan sekolah inklusi.

#### **b. Pengertian Pendidikan Inklusi**

Pendidikan inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar bersama di kelas reguler. Konsep dasar pendidikan inklusi dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang dekat dengan tempat tinggalnya. Semangat penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah memberikan kesempatan atas akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi. Pihak sekolah dituntut untuk melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik (Direktorat PLB, 2007:4).

Para ahli pendidikan mengemukakan pendapat beragam tentang pendidikan inklusi. Namun pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama. Menurut Hildegun Olsen (Tarmansyah, 2007;82), “pendidikan inklusi adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya”. Ini harus mencakup anak-anak penyandang cacat, berbakat. Anak-anak jalanan dan pekerja anak berasal dari populasi terpencil atau berpindah-pindah. Anak yang berasal dari populasi etnis minoritas, linguistik, atau budaya dan anak-anak dari area atau kelompok yang kurang beruntung atau termajinalisasi.

Smith, J. David (2006: 45) berpendapat “kata inklusi berasal dari bahasa Inggris yaitu inclusion, istilah terbaru yang digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan bagi anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program-program sekolah”. Inklusi juga dapat berarti bahwa tujuan pendidikan bagi siswa yang memiliki hambatan adalah, keterlibatan dari tiap anak dalam kehidupan sekolah yang menyeluruh. Inklusi dapat berarti penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial, dan konsep dari (visi misi) sekolah.

Lay Kekeh Marthan (2007: 145) menyatakan bahwa pendidikan inklusi adalah:

- 1) Pendidikan inklusi merupakan layanan yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk mendapatkan pendidikan disekolah umum bersama anak lainnya.
- 2) Pendidikan inklusi dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing anak.
- 3) Pendidikan inklusi merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas program pendidikan bagi semua peserta didik.
- 4) Pendidikan inklusi merupakan layanan yang tepat karena didasarkan pada keunikan dan karakteristik individu.

Menurut Staub dan Peck dikutip oleh (Tarmansyah, 2007:83), “pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas. Hal ini menunjukkan kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak-anak berkelainan, apapun jenis kelainannya”.

Dalam buku pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusi, pendidikan inklusi merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusi setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan/atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya. Dengan kata lain pendidikan inklusi mensyaratkan pihak sekolah yang harus

menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik, bukan peserta didik yang menyesuaikan dengan sistem persekolahan (Direktorat PLB, 2007: 6).

Stainback (Tarmansyah, 2007: 82) mengemukakan bahwa, “pendidikan inklusi adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama”. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa, maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Lebih dari itu, sekolah inklusi juga merupakan tempat setiap anak dapat diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individualnya dapat terpenuhi.

Peserta didik berkebutuhan khusus yang dimaksud meliputi:

- a) siswa dengan gangguan penglihatan (tunanetra)
- b) siswa dengan gangguan pendengaran (tunarungu)
- c) siswa dengan gangguan wicara (tunawicara)
- d) Siswa dengan keterbelakangan mental (tunagrahita)
- e) Siswa dengan kelainan anggota tubuh (tunadaksa)
- f) siswa dengan berkesulitan belajar spesifik
- g) siswa dengan lambat belajar
- h) siswa dengan autisme
- i) siswa dengan gangguan motorik

- j) Siswa dengan gangguan emosi dan perilaku (tunalaras)
- k) tunaganda
- l) Siswa dengan Kecerdasan Luar Biasa/ Berbakat
- m) siswa yang memiliki kebutuhan khusus secara sosial.
- n) Siswa dengan kelainan lainnya

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi yaitu sekolah yang mengadopsi pendidikan untuk semua (education for all) yaitu semua anak bisa belajar di lingkungan yang sama baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus (ABK) tanpa memandang kelainan fisik maupun mental, tanpa adanya diskriminatif dari lingkungan belajar dan saling menghargai keanekaragaman yang bertujuan untuk mewujudkan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus memperoleh pendidikan yang bermutu untuk mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya, yaitu Tenaga Pendidik, Sarana dan Prasarana, Kurikulum, dan sistem evaluasinya pun harus dikemas sesuai dengan kebutuhan siswa baik yang normal maupun anak berkebutuhan khusus.

**c. Perbedaan Pendidikan Segregasi, Pendidikan Terpadu, dan Pendidikan Inklusi.**

Pendidikan Inklusi Pendidikan inklusi hanya merupakan salah satu model penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Model yang lain diantaranya adalah sekolah segregasi dan pendidikan terpadu. Perbedaan ketiga model tersebut dapat diringkas sebagai berikut :

### 1) Pendidikan segregasi

Pendidikan segregasi adalah sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler. Di Indonesia bentuk sekolah segregasi ini berupa satuan pendidikan khusus atau Sekolah Luar Biasa sesuai dengan jenis kelainan peserta didik. Seperti SLB/A (untuk anak tunanetra), SLB/B (untuk anak tunarungu), SLB/C (untuk anak tunagrahita), SLB/D (untuk anak tunadaksa), SLB/E (untuk anak tunalaras), dan lain-lain. Satuan pendidikan khusus (SLB) terdiri atas jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB. Sebagai satuan pendidikan khusus, maka sistem pendidikan yang digunakan terpisah sama sekali dari sistem pendidikan di sekolah reguler, baik kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, sampai pada sistem pembelajaran dan evaluasinya. Kelemahan dari sekolah segregasi ini antara lain aspek perkembangan emosi dan sosial anak kurang luas karena lingkungan pergaulan yang terbatas.

### 2) Pendidikan terpadu

Pendidikan terpadu adalah sekolah yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler tanpa adanya perlakuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan individual anak. Sekolah tetap menggunakan kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta sistem pembelajaran reguler untuk semua peserta didik. Jika ada peserta didik tertentu mengalami kesulitan dalam mengikuti pendidikan, maka

konsekuensinya peserta didik itu sendiri yang harus menyesuaikan dengan sistem yang dituntut di sekolah reguler. Dengan kata lain pendidikan terpadu menuntut anak yang harus menyesuaikan dengan sistem yang dipersyaratkan sekolah reguler. Kelemahan dari pendidikan melalui sekolah terpadu ini antara lain, anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan individual anak. Sedangkan keuntungannya adalah anak berkebutuhan khusus dapat bergaul di lingkungan sosial yang luas dan wajar.

### 3) Pendidikan inklusi

Pendidikan inklusi merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada pendidikan inklusi setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan/atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya. Dengan kata lain pendidikan inklusi mensyaratkan pihak sekolah yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik, bukan peserta didik yang menyesuaikan dengan sistem persekolahan. Keuntungan dari pendidikan inklusi anak berkebutuhan khusus maupun anak biasa dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat, dan kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai potensinya masing-masing. Konsekuensi penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah pihak sekolah dituntut melakukan berbagai perubahan, mulai cara pandang, sikap,

sampai pada proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual tanpa diskriminasi (Direktorat PLB, 2007: 4-6).

#### **d. Pelaksanaan Manajemen Sekolah Inklusi**

Peserta didik sekolah inklusi sangat bervariasi, dari anak biasa, anak berkebutuhan khusus sampai anak-anak yang tidak beruntung dari sisi social, ekonomi maupun kesehatan. Kondisi ini menuntut adanya sistem manajemen sekolah yang fleksibel, akomodatif dan komprehensif agar visi misi dan tujuan sekolah akan tercapai secara optimal.

Berdasarkan buku Pedoman Manajemen Sekolah Inklusi yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah menguraikan beberapa komponen pendidikan dalam pelaksanaan manajemen sekolah berbasis inklusi dalam rangka menyelenggarakan pendidikan inklusi secara efektif dan efisien, yaitu :

##### 1) Manajemen Peserta Didik (siswa)

Manajemen peserta didik bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan peserta didik agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Komponen ini meliputi :

- a) Penerimaan peserta didik baru, meliputi aspek identifikasi, assesmen dan penempatan peserta didik,
- b) Program bimbingan dan konseling,
- c) Pengelompokan belajar peserta didik,
- d) Kehadiran peserta didik,



- e) Mutasi peserta didik,
- f) Data statistik peserta didik yang menggambarkan secara holistik tentang basis data kepesertadidikan, dan
- g) Buku induk peserta didik

Penerimaan peserta didik baru pada sekolah inklusi hendaknya memberi kesempatan kepada ABK untuk dapat diterima dan mengikuti pendidikan di sekolah inklusi terdekat. Untuk tahap awal disesuaikan dengan kesiapan sekolah agar penyelenggaraan kelas lebih optimal.

## 2) Manajemen Kurikulum

Kurikulum yang digunakan di sekolah inklusi adalah kurikulum regular, kurikulum modifikasi dan kurikulum yang diindividualisasikan sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Modifikasi dapat dilakukan dengan cara memodifikasi alokasi waktu atau isi/materi. Komponen pengembangan kurikulum di sekolah inklusi yang perlu diperhatikan meliputi :

- a) Menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar,
- b) Menyusun silabus,
- c) Menetapkan kalender pendidikan dan jumlah jam pelajaran.

Kurikulum program layanan kompensatoris sesuai dengan jenis kelainan peserta didik, dirumuskan oleh tim ahli dan atau guru khusus di sekolah inklusi. Sedangkan alokasi dan bobot program kompensatoris di sekolah inklusi disesuaikan dengan gradasi berat ringannya kondisi peserta didik serta kesiapan sekolah.

## 3) Manajemen Pembelajaran.

Kegiatan pembelajaran merupakan inti dari pengelolaan sekolah, oleh sebab itu semua kegiatan pendukung lainnya harus diarahkan untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajarannya. Untuk itu perlu diciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM), ramah dan bersahabat bagi semua peserta didik. Komponen pembelajaran yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, antara lain :

- a) Menjabarkan kalender pendidikan,
- b) Menyusun jadwal pelajaran dan pembagian tugas mengajar,
- c) Mengatur pelaksanaan penyusunan program pengajaran persemester dan persiapan pelajaran,
- d) Mengatur pelaksanaan penyusunan program kullikuler dan ekstrakurikuler,
- e) Mengatur pelaksanaan penilaian,
- f) Mengatur pelaksanaan kenaikan kelas,
- g) Membuat laporan kemajuan belajar peserta didik, dan
- h) Mengatur usaha perbaikan dan pengayaan pengajaran.

#### 4) Manajemen Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik yang secara langsung bertanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran di sekolah inklusi meliputi guru kelas, guru wali kelas, guru mata pelajaran, guru pendidik khusus (GPK), dan guru bantu. Kekhasan manajemen tenaga pendidik pada sekolah inklusi adalah dalam pengaturan pembagian tugas dan pola kerja antara guru pembimbing khusus dengan guru reguler. Guru reguler bertanggung

jawab dalam pembelajaran bagi semua peserta didik di kelasnya. Sedangkan guru pembimbing khusus bertanggung jawab memberikan layanan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Dalam keadaan tertentu guru pembimbing khusus dapat mendampingi peserta didik pada saat peserta didik mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh guru reguler.

#### 5) Manajemen Sarana-prasarana

Anak berkebutuhan khusus memerlukan sarana prasarana dalam proses pembelajaran di sekolah inklusi meliputi peserta didik ;

- a) Tunanetra/ low vision ; kacamata, teleskop, riglet, huruf braille, mesin ketik, Braille;
- b) Tunarungu; alat bantu dengar, alat pengukur tingkat pendengaran, kamus sistem isyarat bahasa Indonesia;
- c) Tunagrahita dan berkesulitan belajar, alat bantu belajar mengajar;
- d) Tunadaksa, seperti; ramp (lantai landai sebagai pengganti tangga), kursi roda;
- e) Berbakat (gifted and talented) Berbagai sarana lainnya seperti; buku-buku referensi, alat praktek, laboratorium, alat kesenian dan olahraga yang memadai untuk memenuhi rasa ingin tahu dan minat anak berbakat.

Manajemen sarana-prasarana sekolah berfungsi; merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi, dan mengevaluasi kebutuhan dan pengguna sarana-prasarana agar dapat memberikan sumbangan secara optimal pada kegiatan pembelajaran.

#### 6) Manajemen Dana/ Pembiayaan

Komponen biaya merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan pembelajaran bersama komponen-komponen lainnya. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, perlu dialokasikan dana khusus, yang antara lain untuk keperluan;

- a) Kegiatan identifikasi dan assesmen peserta didik berkebutuhan khusus,
- b) Modifikasi kurikulum,
- c) Insentif bagi tenaga kependidikan yang terlibat,
- d) Pengadaan sarana-prasarana,
- e) Pelaksanaan kegiatan.

Pada tahap perintisan sekolah inklusi, diperlukan dana bantuan sebagai stimulasi, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Namun untuk penyelenggaraan program selanjutnya diusahakan agar sekolah bersama orangtua peserta didik dan masyarakat (Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah), serta pemerintah daerah menanggunginya.

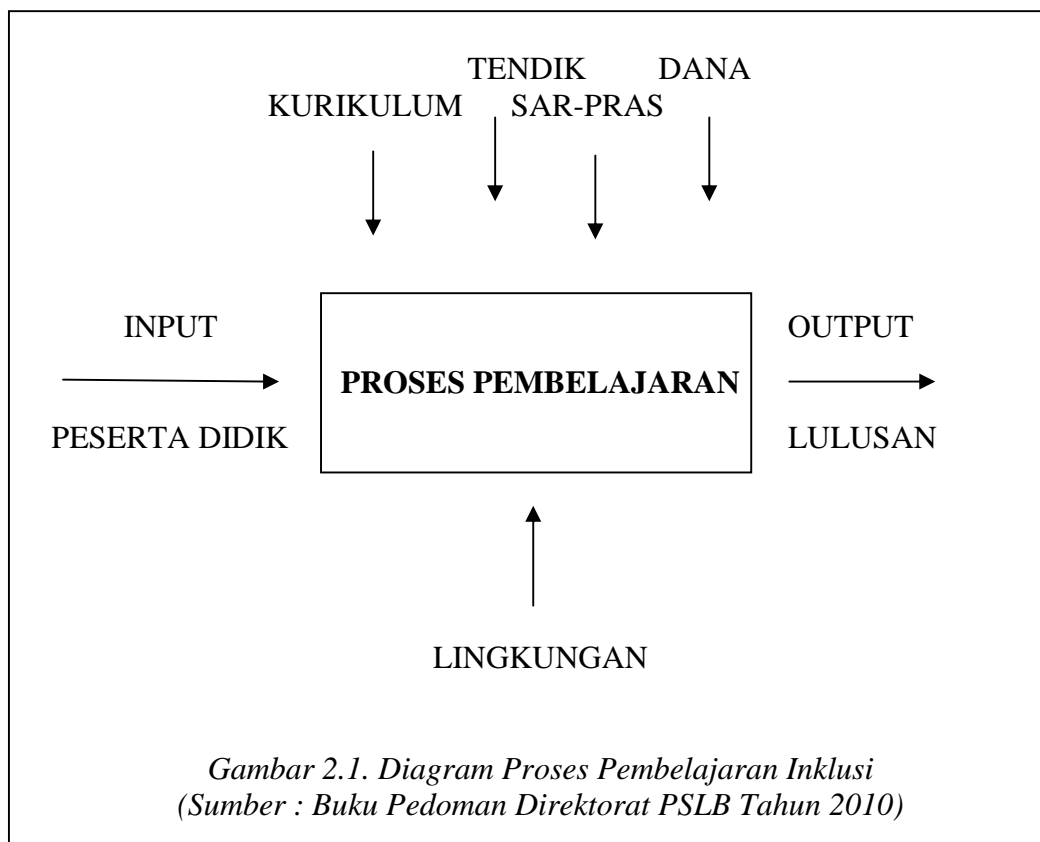
#### 7) Manajemen Lingkungan (Hubungan Sekolah dengan Masyarakat)

Masyarakat hendaknya selalu dilibatkan dalam pembangunan pendidikan agar tumbuhkan “rasa ikut memiliki” atas keberadaan lembaga pendidikan disekitarnya. Maju mundurnya sekolah di lingkungannya juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat setempat sehingga bukan hanya Kepala sekolah dan dewan guru yang

memikirkan maju mundurnya sekolah tetapi masyarakat setempat terlibat pula memikirkannya.

Untuk menarik simpati masyarakat agar bersedia berpartisipasi memajukan sekolah, perlu dilakukan berbagai hal, antara lain dengan cara pemberitahuan mengenai program-program sekolah baik program yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, maupun akan dilaksanakan sehingga masyarakat mendapat gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan terutama dalam melakukan sosialisasi sekolah inklusi. Pemahaman dan kepedulian masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap sikap peserta didik lainnya yang belajar bersama sama dengan ABK. Dengan demikian akan tercipta iklim belajar yang kondusif di sekolah inklusi.

Dari penjelasan di atas dapat di gambarkan dalam diagram berikut :



## e. Tujuan & Landasan Pendidikan Inklusi

### 1) Tujuan Pendidikan Inklusi

Secara umum pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi pribadinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara ( UU No.20 tahun 2003, Pasal 1 ayat 1).

Dalam buku pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan:

- a) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya.
- b) Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar.
- c) Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah.
- d) Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran.
- e) Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 32 ayat 2 yang berbunyi “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Tujuan praktis yang ingin dicapai dalam pendidikan inklusi meliputi tujuan langsung oleh anak, oleh guru, oleh orang tua dan oleh masyarakat.

- a) Tujuan yang ingin dicapai oleh anak dalam mengikuti kegiatan belajar dalam inklusi antara lain adalah:
  - i. Berkembangnya kepercayaan pada diri anak, merasa bangga pada diri sendiri atas prestasi yang diperolehnya.

- ii. Anak dapat belajar secara mandiri, dengan mencoba memahami dan menerapkan pelajaran yang diperolehnya di sekolah ke dalam kehidupan sehari-hari.
  - iii. Anak mampu berinteraksi secara aktif bersama teman-temannya, guru, sekolah dan masyarakat.
  - iv. Anak dapat belajar untuk menerima adanya perbedaan, dan mampu beradaptasi dalam mengatasi perbedaan tersebut.
- b) Tujuan yang ingin dicapai oleh guru-guru dalam melaksanakan pendidikan inklusi antara lain adalah:
- i. Guru akan memperoleh kesempatan belajar dari cara mengajar dengan setting inklusi.
  - ii. Terampil dalam melakukan pembelajaran kepada peserta didik yang memiliki latar belakang beragam.
  - iii. Mampu mengatasi berbagai tantangan dalam memberikan layanan kepada semua anak.
  - iv. Bersikap positif terhadap orang tua, masyarakat, dan anak dalam situasi beragam.
  - v. Mempunyai peluang untuk menggali dan mengembangkan serta mengaplikasikan berbagai gagasan baru melalui komunikasi dengan anak di lingkungan sekolah dan masyarakat.



- c) Tujuan yang akan dicapai bagi orang tua antara lain adalah:
- i. Para orang tua dapat belajar lebih banyak tentang bagaimana cara mendidik dan membimbing anaknya lebih baik di rumah, dengan menggunakan teknik yang digunakan guru di sekolah.
  - ii. Mereka secara pribadi terlibat, dan akan merasakan keberadaanya menjadi lebih penting dalam membantu anak untuk belajar.
  - iii. Orang tua akan merasa dihargai, merasa dirinya sebagai mitra sejajar dalam memberikan kesempatan belajar yang berkualitas kepada anaknya.
  - iv. Orang tua mengetahui bahwa anaknya dan semua anak yang di sekolah, menerima pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kemampuan masing-masing individu anak.
- d) Tujuan yang diharapkan dapat dicapai oleh masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan inklusi antara lain adalah:
- i. Masyarakat akan merasakan suatu kebanggaan karena lebih banyak anak mengikuti pendidikan di sekolah yang ada di lingkungannya.
  - ii. Semua anak yang ada di masyarakat akan terangkat dan menjadi sumber daya yang potensial, yang akan lebih penting adalah bahwa masyarakat akan lebih terlibat di sekolah dalam rangka menciptakan hubungan yang lebih baik antara sekolah dan masyarakat ( Tarmansyah, 2007:112-113).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan inklusi yang ingin dicapai adalah tujuan bagi anak berkebutuhan khusus, bagi pihak sekolah, bagi guru, bagi orang tua dan bagi masyarakat.

## **2) Landasan Yuridis Pendidikan Inklusi**

Landasan yuridis penyelenggaraan Pendidikan Inklusi berdasarkan Hasil Revisi Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- a) UUD 1945 (Amandemen) Ps. 31: Ayat (1) berbunyi ‘Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) ‘Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya’.
- b) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Ps. 48 ‘Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Ps. 49 ‘Negara, Pemerintah, Keluarga, dan Orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan’.
- c) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- d) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Stándar Nasional Pendidikan. Pasal 2 ayat (1) Lingkungan Stándar Nasional Pendidikan. Dalam PP No. 19/2005 tersebut juga dijelaskan bahwa satuan pendidikan khusus terdiri atas : SDLB, SMPLB dan SMALB.

- e) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- f) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

## **f. Teori Belajar**

### 1) Teori Psikologi Abnormal

Psikologi abnormal kadang-kadang disebut juga psikopatologi. Istilah yang paling lazim ditemukan adalah perilaku abnormal dan psikopatologi. Menurut Coleman dkk, 1980, *Abnormal Behavior* berarti penampilan *inner personality* (kepribadian seseorang) dan perilaku luar atau kedua-duanya. Sedangkan istilah psikopatologi mengacu pada studi mengenai perilaku abnormal atau gangguan mental, menyangkut wilayah ilmu pengetahuan. Dalam praktisnya istilah psikopatologi juga identik dengan psikologi abnormal atau gangguan mental.

Berkenaan dengan definisi psikologi abnormal, pada Wikipedia (2016), dinyatakan:

“Psikologi Abnormal adalah salah satu cabang psikologi yang berupaya untuk memahami pola perilaku abnormal dan cara menolong orang-orang yang mengalaminya. Psikologi abnormal mencakup sudut pandang yang lebih luas tentang perilaku abnormal dibandingkan studi terhadap gangguan mental (atau psikologis).”

Berdasarkan pada sejarah mengenai teori-teori yang mempelajarinya, gangguan jiwa dapat dilihat berdasarkan filsafat mengenai hakikat manusia, yang mendasarinya secara teoritis. Berikut ini akan dikemukakan beberapa teori perilaku abnormal (*psikopatologi*) tersebut:

a) Model Psikoanalitik

Teori psikodinamika dalam abnormalitas mengajukan pendapat bahwa setiap perilaku, pikiran, maupun emosi, baik yang normal maupun tidak normal, dipengaruhi paling banyak oleh proses tidak sadar. Hal ini dapat dipahami karena Freud yang melahirkan landasan bagi teori-teori ini menganggap bahwa gejala-gejala perilaku merupakan tampilan dari ketidaksadaran. Freud mengembangkan Psikoanalisis yang memiliki tiga makna penting yaitu sebagai: 1) Teori kepribadian dan psikopatologi, 2) metode penyelidikan atau asesmen jiwa, dan 3) suatu bentuk *treatment* atau penanganan atas patologi. Jadi psikoanalisis dapat diartikan sebagai teori, teknik, teknik asesmen maupun psikoterapi.

b) Model Behavioristik

Pendekatan ini mempunyai akar berupa penemuan oleh Ivan Pavlov yang mengenai refleksologi, ialah bahwa badan kita secara refleks, spontan, tanpa diolah otak memberikan respon terhadap rangsangan yang timbul. Model behaviorisme melihat perilaku abnormal secara esensial akibat dari tiga keadaan, yaitu: 1) Kegagalan dalam mempelajari perilaku yang adaptif; 2) adanya

pembelajaran atas perilaku yang tidak efektif; 3) situasi konflik yang meminta individu untuk melakukan diskriminasi atau keputusan mengenai apa yang ia rasakan tidak mampu.

c) Model Humanistik

Model ini menekankan pada pengarahan diri dan kepuasan. Model ini ditandai oleh orientasi umum manusia lebih dari prinsip perkembangan dan pemfungsian manusia. Yang dilihat dari model ini adalah makhluk individual yang memiliki potensi untuk berbuat baik dan memiliki kapasitas bertindak yang bersifat positif dalam memenuhi apa yang dibutuhkannya. Salah seorang eksponen utama paham ini adalah Carl Rogers.

d) Pendekatan Kognitif

Pendekatan ini merupakan kelanjutan dari pendekatan behaviorisme, dimana pendekatan kognitif berpendapat bahwa kognisi ialah pikiran dan keyakinan yang membentuk perilaku kita maupun emosi yang kita alami.

(Dikutib dari buku Pengantar Psikologi Abnormal: 2015)

2) Teori Belajar Humanistik

Pendidikan humanistik sangat mementingkan adanya rasa kemerdekaan dan tanggung jawab. Aliran ini mempunyai tujuan pendidikan yaitu memanusiakan manusia agar manusia mampu mengaktualisasi diri sebaik-baiknya. Aliran humanistik tidak mempunyai teori belajar khusus, tetapi hanya bersifat eklektik, dalam arti mengambil teori yang sesuai (kognitif)

asal tujuan pembelajaran tercapai. Teori belajar humanistik ini menurut peneliti merupakan teori belajar yang tepat dalam pendidikan inklusi. Karena setiap individu merupakan pribadi yang unik, di dunia ini tidak ada dua orang yang persis sama. Perbedaan individu merupakan salah satu aspek yang memperoleh perhatian dalam bidang pendidikan, terutama kecepatan dan irama perkembangannya. Sehingga manusia dipandang sebagai makhluk bhineka (*individual differences*), kekurangan atau keunggulan adalah suatu bentuk keberagaman manusia. Pandangan seperti ini menunjukkan bahwa perbedaan peserta didik ke dalam kelompok normal dan tidak normal, pintar dan bodoh menjadi tidak relevan lagi, disinilah perlunya pembelajaran yang efektif sesuai dengan kebutuhan siswa.

a) Fungsi pendidik

Peran pendidik dalam pendekatan humanistik adalah sebagai fasilitator belajar. Pendidik adalah individu yang memiliki tugas membimbing belajar sebagai model pemecahan masalah, sebagai katalisator dalam memprakarsai proses belajar, sebagai pembantu dalam proses belajarnya, sebagai teman peserta didik dalam mengkaji dan memecahkan masalah.

b) Bentuk pembelajaran

Bentuk pembelajaran melalui pendekatan humanistik adalah bahwa peserta didik dituntut untuk selalu memotivasi diri. Untuk mencapai ke arah itu kegiatan belajar hendaknya mendorong peserta didik untuk belajar cara-cara belajar dan menilai belajarnya sendiri. Program pembelajaran

yang diterapkan dalam pendekatan humanistik umumnya menggunakan kegiatan terbuka di mana peserta didik harus menemukan informasi, membuat keputusan, memecahkan masalah dan membuat produk sendiri. Dalam pendidikan humanistik, peserta didik tidak memiliki tempat duduk yang tetap seperti halnya pendidikan konvensional. Peserta didik dapat belajar mandiri atau belajar dengan kelompok.

### 3) Teori Belajar Gestalt

Berbeda dengan humanistik yang menuntut peserta didik untuk selalu memotivasi diri, teori belajar ini melihat pentingnya belajar secara keseluruhan. Jika mempelajari sebuah buku, bacalah dari awal sampai akhir dulu, baru kemudian bab demi bab. Dalam linguistik dan pengajaran bahasa, aliran ini melihat bahasa sebagai keseluruhan utuh, bukan bagian demi bagian. Belajar bahasa tidak dilakukan setapak demi setapak, dari fonem, lalu morfem dan kata, frasa, klausa sampai dengan kalimat dan wacana. Bahasa adalah sesuatu yang mempunyai struktur dan sistem, dalam arti bahasa terdiri atas bagian-bagian yang saling berpengaruh dan saling bergantung.

Pandangan Gestalt ini dapat diterapkan pada anak tunanetra, misalnya dalam pelajaran Biologi (IPA) dalam menanamkan konsep yang diluar jangkauan rentang perabaan usahakan berikan imajinasi secara utuh terlebih dahulu baru bagian perbagian. Contoh: Dalam mengenalkan seekor gajah siswa tidak harus meraba seluruh bagian gajah tetapi cukup

sebagian saja yang merupakan ciri khas dari gajah tersebut. Selebihnya bersifat informatif. Oleh karena itu tidak harus diterapkan secara klasikal, mengingat karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus tidak semuanya memiliki kemampuan untuk memahami sesuatu secara unit/global.

#### 4) Teori Belajar Kognitif

Dalam belajar, kognitivisme mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungan. Bagi kognitivisme, belajar merupakan interaksi antara individu dan lingkungan, dan hal itu terjadi terus-menerus sepanjang hayatnya.

Kognisi adalah suatu perabot yang merupakan pusat penggerak berbagai kegiatan: mengenali lingkungan, melihat berbagai masalah, menganalisis berbagai masalah, mencari informasi baru, menarik simpulan dan sebagainya. Pakar kognitivisme yang besar pengaruhnya ialah Jean Piaget, yang pernah mengemukakan pendapatnya tentang perkembangan kognitif anak yang terdiri atas beberapa tahap. Dalam hal pemerolehan bahasa ibu, Piaget mengatakan bahwa (i) anak itu di samping meniru-niru juga aktif dan kreatif dalam menguasai bahasa ibunya; (ii) kemampuan untuk menguasai bahasa itu didasari oleh adanya kognisi; (iii) kognisi itu memiliki struktur dan fungsi. Fungsi itu bersifat genetik, dibawa sejak lahir, sedangkan struktur kognisi bisa berubah sesuai dengan kemampuan dan upaya individu.



Di samping itu, teori ini pun mengenal konsep bahwa belajar ialah hasil interaksi yang terus-menerus antara individu dan lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Keterbatasan kognisi Anak Berkebutuhan Khusus tidak selamanya bersifat genetik, tetapi dapat juga sebagai dampak keterbatasan dalam menerima stimulus yang ada. Oleh karena itu seorang guru bagi Anak Pendidikan Khusus sangat bijaksana manakala mau memahami bahwa interaksi yang terus-menerus antar individu dengan individu lain atau antar individu dan lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi adalah sangat dibutuhkan.

#### 5) Pendekatan Komunikatif

Ini adalah pendekatan khas dalam pembelajaran di Sekolah bagi Anak Pendidikan Khusus. Karakteristik peserta didik di Sekolah Pendidikan Khusus adalah mengalami keterbatasan kemampuan komunikasi sebagai dampak dari ketunaan yang dideritanya. Pada umumnya siswa memiliki pengalaman yang sangat terbatas, jadi berikan pengalaman tambahan agar komunikasi lebih bermakna dari yang ada. Guru harus mampu menempatkan kebutuhan tingkat komunikasi adalah kuncinya. Berikan apa yang siswa butuhkan bukan apa yang bisa kita berikan/miliki.

Intinya pendekatan ini menuntut agar (i) siswa diberi kebebasan berkomunikasi tanpa beban (wajib berbahasa Indonesia yang baik dan benar); (ii) siswa mampu mengomunikasikan gagasannya kepada orang lain dan mampu menangkap dan memahami gagasan orang lain; (iii) siswa lebih banyak belajar berbuat daripada belajar berteori (teori,

norma/kaidah); (iv) guru tidak perlu banyak menyalahkan, apalagi menginterupsi ketika siswa sedang berbuat sesuatu, karena hal itu dapat mematikan motivasi siswa untuk berkomunikasi.

Perbuatan sebagai suatu keterampilan harus kita pandang secara holistik (menyeluruh), bukan serpih-serpih (bagian demi bagian). Oleh Karena itu pada hakekatnya Pendekatan komunikatif juga sejalan dengan pembelajaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus.

### **3. Tinjauan Tentang Efektivitas Pembelajaran**

#### **a. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas dalam pengertian secara umum adalah : “kemampuan berdaya guna dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan sehingga menghasilkan hasil guna (efisien) yang maksimal”. Efektivitas merujuk pada kemampuan untuk memiliki tujuan yang tepat atau mencapai tujuan yang telah yang telah ditetapkan. Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna. Tersedianya sumber belajar dengan memanfaatkan media pembelajaran secara tepat merupakan faktor pendorong dan pemeliharaan kegiatan belajar siswa yang produktif, efektif, dan efisien. Efektifitas pembelajaran dapat dicapai apabila rancangan pada persiapan, implementasi, dan evaluasi dapat dijalankan sesuai prosedur serta sesuai dengan fungsinya masing-masing. Efektivitas

pembelajaran dapat diukur dengan mengadaptasi pengukuran efektivitas pelatihan yaitu melalui validasi dan evaluasi (Leslie Rae, 2001:3).

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian tentang efektivitas adalah serangkaian tugas-tugas yang dilakukan orang-orang untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu organisasi.

#### **b. Ciri-Ciri Efektivitas Pembelajaran**

Menurut Harry Firman (dalam skripsi Wiwi Irjanty Kentjil: 2010: 9) keefektifan pembelajaran di tandai dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Berhasil menghantarkan siswa mencapai tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan.
- 2) Memberikan pengalaman belajar yang atraktif, melibatkan siswa secara aktif sehingga menunjang pencapaian tujuan instruksional.
- 3) Memiliki sarana-sarana yang menunjang proses belajar mengajar

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa program pembelajaran yang baik adalah bagaimana guru berhasil menghantarkan anak didiknya untuk mendapatkan pengetahuan dan memberikan pengalaman belajar yang antraktif.

Berdasarkan ciri pembelajaran efektif seperti yang digambarkan di atas, keefektifan program pembelajaran tidak hanya ditinjau dari tingkat prestasi belajar. melainkan harus pula ditinjau dari segi proses dan sarana penunjang. Aspek hasil meliputi tinjauan terhadap hasil belajar siswa setelah mengikuti program pembelajaran yang mencakup kemampuan

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek proses meliputi pengamatan terhadap keterampilan siswa, motivasi, respon, kerjasama, partisipasi aktif, tingkat kesulitan pada penggunaan media, waktu serta teknik pemecahan masalah yang ditempuh siswa saat kegiatan belajar mengajar berlangsung aspek sarana penunjang meliputi tinjauan-tinjauan terhadap fasilitas fisik dan bahan serta sumber yang diperlukan siswa dalam proses belajar mengajar seperti ruang kelas, laboratorium, media pembelajaran dan buku-buku teks.

**c. Kriteria Efektifitas Pembelajaran**

Efektifitas metode pembelajaran merupakan suatu ukuran yang berhubungan dengan tingkat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran. Metode pembelajaran dikatakan berhasil atau tidaknya dilihat dari bagaimana keefektifan pembelajaran yang dapat memotivasi siswa agar menjadi lebih giat agar memperoleh hasil belajar yang memuaskan.

Efektivitas pembelajaran dapat ditinjau dengan menggunakan berbagai model evaluasi. Salah satu model yang populer adalah model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang diajukan oleh Stufflebeam (1972:73) dalam Tim MKDK Kurikulum dan Pembelajaran (2001:40). Model ini bertitik tolak pada pandangan bahwa keberhasilan program pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain sebagai berikut:

- 1) Karakteristik peserta didik dan lingkungan,
- 2) Tujuan program dan peralatan yang dipakai, dan
- 3) Prosedur dan mekanisme pelaksanaan program.

Menurut model ini, terdapat empat dimensi yang perlu dievaluasi sebelum, selama, dan sesudah program pendidikan dikembangkan. Dimensi-dimensi tersebut antara lain sebagai berikut.

- 1) Konteks (*context*), merupakan situasi atau latar belakang yang memengaruhi tujuan dan strategi yang dikembangkan, misalnya: kebijakan departemen atau unit kerja yang bersangkutan, sasaran yang ingin dicapai oleh unit kerja, dan masalah ketenagaan yang dihadapi unit kerja.
- 2) Masukan (*input*), mencakup bahan, peralatan, dan fasilitas yang disiapkan untuk keperluan program, misalnya: dokumen kurikulum dan bahan ajar yang dikembangkan, staf pengajar yang bertugas, sarana/prasarana yang tersedia, dan media pendidikan yang digunakan.
- 3) Proses (*process*), merupakan pelaksanaan nyata dari program pendidikan di kelas/lapangan yang meliputi: pelaksanaan proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi, dan pengelolaan program.
- 4) Hasil (*product*), yaitu keseluruhan hasil yang dicapai oleh program. Hasil utama yang diharapkan dari program produktif adalah meningkatnya kompetensi siswa sesuai bidang keahliannya.

#### d. Konsep Pembelajaran yang Efektif

Pembelajaran dikatakan efektif apabila dalam proses pembelajaran setiap elemen berfungsi secara keseluruhan, peserta merasa senang, puas dengan hasil pembelajaran, membawa kesan, sarana/fasilitas memadai, materi dan metode *affordable*, guru profesional. Tinjauan utama efektivitas pembelajaran adalah *outputnya*, yaitu kompetensi siswa.

Efektivitas pembelajaran dapat diukur dengan mengadaptasi pengukuran efektivitas pelatihan yaitu melalui validasi dan evaluasi (Lesli Rae, 2001:3). Untuk mengukur keberhasilan pembelajaran harus ditetapkan sejumlah fakta tertentu, antara lain dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

- 1) Apakah pembelajaran mencapai tujuannya?
- 2) Apakah pembelajaran memenuhi kebutuhan siswa?
- 3) Apakah siswa memiliki keterampilan yang diperlukan?
- 4) Apakah keterampilan tersebut diperoleh siswa sebagai hasil dari pembelajaran?
- 5) Apakah pelajaran yang diperoleh diterapkan dalam situasi yang sebenarnya?
- 6) Apakah pembelajaran menghasilkan lulusan yang mampu berkerja dengan efektif dan efisien? (diadaptasi dari Rae, 2001:5)

Untuk pengukuran tingkat efektivitas program sekolah penyelenggara pendidikan inklusi diperlukan karakteristik atau ciri-ciri bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusi tersebut berjalan secara efektif.

Penyusunan kriteria ini disesuaikan dengan konsep efektivitas dan acuan efektivitas yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Luar Biasa. Karakteristik atau ciri-ciri efektivitas program sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dikatakan efektif paling tidak jika memenuhi kriteria efektivitas.

Oleh karena itu peneliti menggunakan kriteria pendidikan inklusi mengacu pada buku panduan umum penyelenggaraan pendidikan inklusi yang dikeluarkan oleh Direktorat PLB (Direktorat PLB, 2007: 29).

Kriteria sekolah penyelenggara pendidikan inklusi sebagai berikut:

- 1) Kesiapan sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan inklusi (kepala sekolah, komite sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua),
- 2) Terdapat anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah,
- 3) Tersedia guru pendidikan khusus (GPK) dari PLB (guru tetap sekolah atau guru yang diperbantukan dari lembaga lain),
- 4) Komitmen terhadap penuntasan wajib belajar,
- 5) Memiliki jaringan kerjasama dengan lembaga lain yang relevan,
- 6) Tersedia sarana penunjang yang mudah diakses oleh semua anak,
- 7) Pihak sekolah telah memperoleh sosialisasi tentang pendidikan inklusi,
- 8) Sekolah tersebut telah terakreditasi,
- 9) Memenuhi prosedur administrasi yang ditentukan.

## **B. Kerangka Pikir**

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia dalam pengembangan bakat dan potensi yang ada dalam diri seseorang. Pendidikan juga berperan penting dalam proses kehidupan manusia yang di dalamnya terkandung proses belajar yang tersusun secara sistematis dan terus menerus, maka kebijakan pemerintah harus senantiasa berkembang dan memberikan jalan keluar tentang permasalahan-permasalahan pendidikan yang berkembang di masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman. Kebijakan pemerintah sangatlah penting dalam mengatur segala kelangsungan harkat martabat berkehidupan warga negara supaya semua dapat merasakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah salah satunya kebijakan pendidikan.

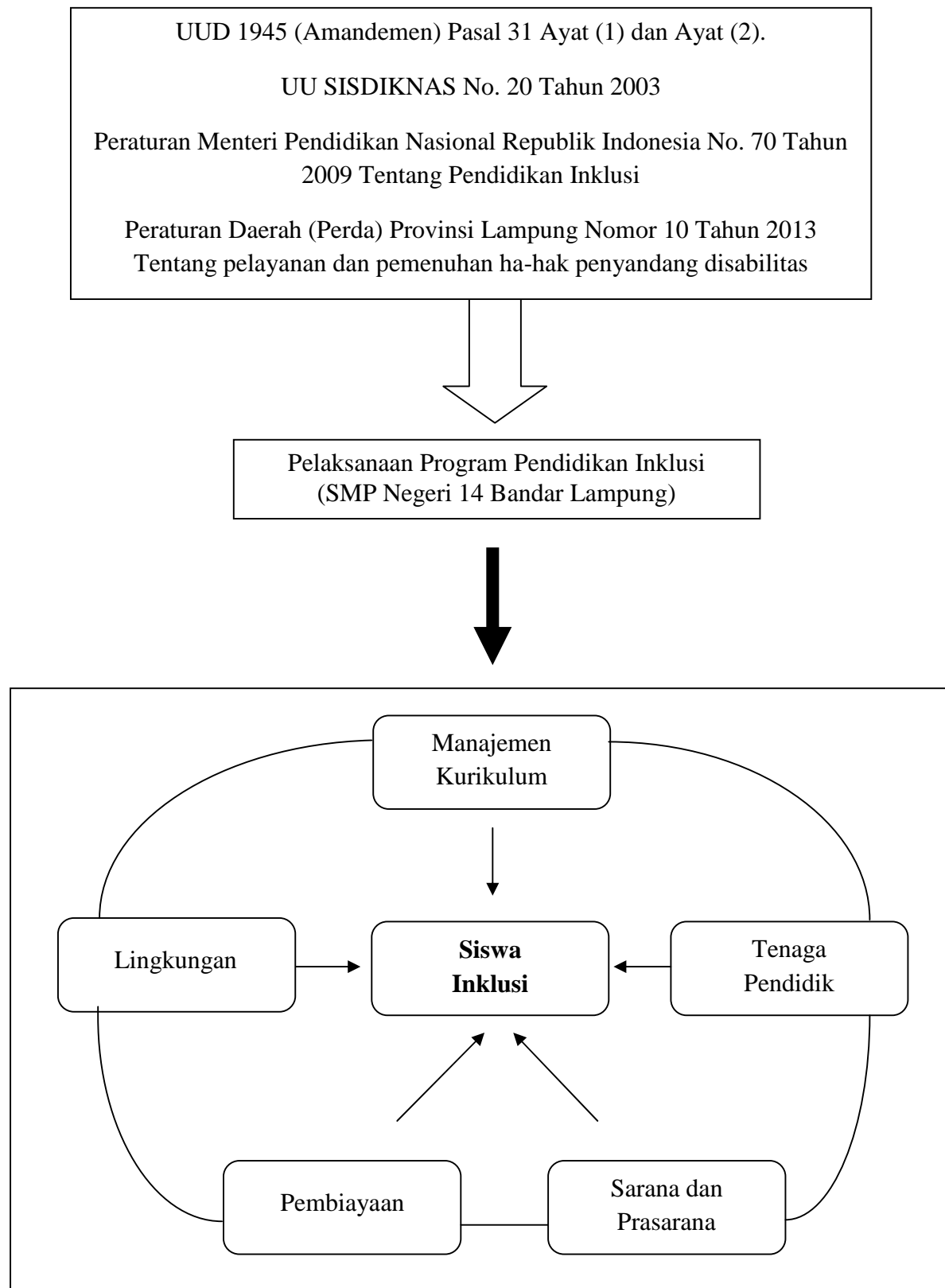
Pendidikan merupakan suatu keharusan yang harus dinikmati oleh semua orang tanpa memandang anak berkebutuhan khusus maupun normal. Seperti yang termaktub pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 5 Ayat 1 menyebutkan bahwa: “setiap warga negara mempunyai hak yang untuk pendidikan bermutu”. Warga yang berkelainan juga telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat 2, yang menyebutkan “Warga yang kelainan emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”.

Pendidikan inklusi adalah bentuk kebijakan pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan pendidikan untuk semua anak yaitu anak



berkelainan maupun normal untuk belajar bersama dalam satu lingkup proses belajar mengajar agar semua anak dapat belajar tanpa membedakan secara fisik, suku, budaya, kecerdasan, maupun sosial ekonomi. Sekolah disini tidak hanya berorientasi pada proses belajar mengajar saja melainkan lebih bijak dalam pembuatan peraturan, seperti ketersediaan guru pembimbing, sarana prasarana, program-program, dan memiliki sistem evaluasi, yang menunjang perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus.

Secara lebih jelas, kerangka pikir ini akan digambarkan dalam gambar berikut:



Gambar 2. Skema Kerangka Pikir

### **C. Kajian Penelitian Yang Relevan**

Penelitian yang relevan dengan judul Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusi, ialah :

#### **1. Tingkat Lokal**

Penelitian dilakukan oleh Nofita Sari Astanu, Program Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan judul penelitian “Implementasi Program Pendidikan Inklusif (Studi Evaluatif Metode CIPP di SMA Negeri 2 Metro). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan mengevaluasi pengimplementasian program pendidikan inklusif di SMA Negeri 2 Metro. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik mengumpulkan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut jelas berbeda, lokasi penelitian pun berbeda, hanya saja relevan karena yang diukur adalah program pendidikan inklusi.

#### **2. Tingkat Nasional**

Penelitian dilakukan oleh Redi Susanto, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, yang berjudul Efektivitas Program Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi di SDN Giwangan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas program sekolah penyelenggara

pendidikan inklusif di SDN Giwangan yang diantaranya meliputi: tenaga pendidik, sarana dan prasarana, monitoring dan evaluasi.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, tenaga pendidik, dan siswa, dengan pertimbangan individu yang terlibat secara langsung dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusif. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi data. Data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Beberapa penelitian relevan tersebut menunjukkan bahwa judul penelitian yang dilakukan peneliti berkaitan dengan pelaksanaan program pendidikan inklusi.

### **III.METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Pada penyelesaian suatu masalah yang dihadapi metodologi penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian ilmiah disini diperlukan suatu metode yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti sebelumnya, sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Metode penelitian dirasakan perlu, guna memperoleh data yang akurat dan pengembangan pengetahuan serta menguji suatu kebenaran di dalam pengetahuan tersebut dan ini akan menentukan nilai ilmiah atau tidaknya suatu hasil penelitian yang telah dilakukan.

Penggunaan metode deskriptif didasarkan pada asumsi bahwa penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan keterangan atau gambar secara aktual dan faktual terhadap gejala sosial, dalam arti bahwa penelitian tersebut memusatkan pada pemecahan masalah yang terjadi pada masa sekarang, yaitu memperoleh gambaran yang nyata mengenai pelaksanaan program pendidikan inklusi di SMP Negeri 14 Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan salah satu pendekatan penelitian ilmu-ilmu sosial termasuk dalam pemahaman

mendalam dari tingkah laku manusia. Penelitian kualitatif ini di definisikan sebagai sebuah proses *inquiry* untuk memahami masalah kemanusiaan dan sosial didasarkan pada kerumitan yang kompleks, gambaran yang *holistic*, dibentuk melalui kata-kata, pandangan dari para informan dilaporkan secara detail, dan dilakukan secara alamiah (*natural setting*). Pendekatan kualitatif dirancang tidak untuk menguji hipotesis, tetapi berupaya untuk mendeskripsikan data, fakta, dan keadaan atau kecenderungan yang ada. Pendekatan kualitatif juga digunakan untuk melakukan analisis dan memprediksi apa yang seharusnya dilakukan untuk memecahkan masalah dan atau untuk mencapai suatu keinginan di masa yang akan datang.

Penelitian ini berusaha untuk memahami perilaku dan pandangan objek-objek penelitian melalui pengamatan, wawancara mendalam, dan diskusi yang terarah serta mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian. Oleh karena itu, Peneliti berusaha menggambarkan hasil penelitian atau fenomena-fenomena yang diteliti, kemudian digambarkan ke dalam bentuk uraian-uraian yang menunjukkan bagaimana pelaksanaan program pendidikan inklusi di SMP Negeri 14 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.

Selama proses penelitian, peneliti akan lebih banyak berkomunikasi dengan subjek penelitian yaitu Kepala Sekolah, Guru, dan Peserta Didik normal maupun inklusi pada SMP Negeri 14 Bandar Lampung. Selanjutnya dalam penelitian ini peneliti akan lebih banyak menguraikan secara deskriptif hasil temuan-temuan di lapangan.

## **B. Subjek penelitian atau Informan**

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu,. “Pemilihan subjek penelitian secara *purposive* didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan tujuan penelitian”, Sugiyono ( 2010: 299). Berdasarkan beberapa pertimbangan, maka subjek penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala SMP Negeri 14 Bandar Lampung
2. Wakil Kepala SMP Negeri 14 Bandar Lampung
3. Guru di SMP Negeri 14 Bandar Lampung
4. Peserta didik normal maupun inklusi di SMP 14 Bandar Lampung
5. Masyarakat sekitar SMP 14 Bandar Lampung

## **C. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Instrument atau alat yang dimaksud adalah semenjak awal hingga akhir penelitian, peneliti sendiri yang berfungsi penuh atau peneliti sendiri yang terlibat aktif dalam penelitian yang dilakukan, mulai dari menetapkan fokus masalah, sumber data analisis data, sampai membuat kesimpulan. Selain itu dalam penelitian kualitatif ini, peneliti harus mampu berperan sebagai peneliti itu sendiri dan sebagai evaluator. Penelitian ini menggunakan *human instrument*.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi, yaitu:

##### **1. Observasi**

Pengambilan data menggunakan observasi dimaksudkan untuk melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang berkaitan dengan proses pelaksanaan program pendidikan inklusi di SMP Negeri 14 di Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016 secara langsung.

##### **2. Wawancara**

Teknik wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan, yaitu dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.

Wawancara dilakukan dengan wawancara terbuka, yaitu kondisi dimana para subjek penelitian tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan dari wawancara. Peneliti dalam melakukan wawancara berpedoman pada pedoman wawancara, agar apa yang ditanyakan kepada terwawancara tidak melenceng dari tujuan penelitian. Peneliti menggunakan pedoman wawancara hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Teknik wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumber yang dipercaya dan relevan tentang Pelaksanaan program pendidikan inklusi di SMP Negeri 14 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.



Untuk memperkuat akurasi data wawancara pelaksanaan wawancara menggunakan pedoman wawancara dan alat perekam suara (*voice recorder*). Pedoman wawancara merupakan rincian pertanyaan dari setiap indikator. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk memandu peneliti dalam pelaksanaan wawancara berisi tentang identitas partisipan, indikator, dan pertanyaan-pertanyaan pada setiap fokus pertanyaan.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, buku tentang teori, pendapat ataupun hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik ini untuk menghimpun secara selektif bahan-bahan yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan teori.

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan adalah setiap bahan-bahan tertulis, yang kemudian didukung dengan kajian pustaka berupa buku-buku maupun peraturan perundang-undangan yang terkait. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

## **E. Uji Kredibilitas**

### **1. Kritik Sumber**

Penelitian ini menggunakan kritik sumber yaitu cara-cara meneliti outensitas dan kredibilitas sumber yang diperoleh. Kritik dilakukan dengan kritik intern dan ekstern.

### **a. Kritik Intern**

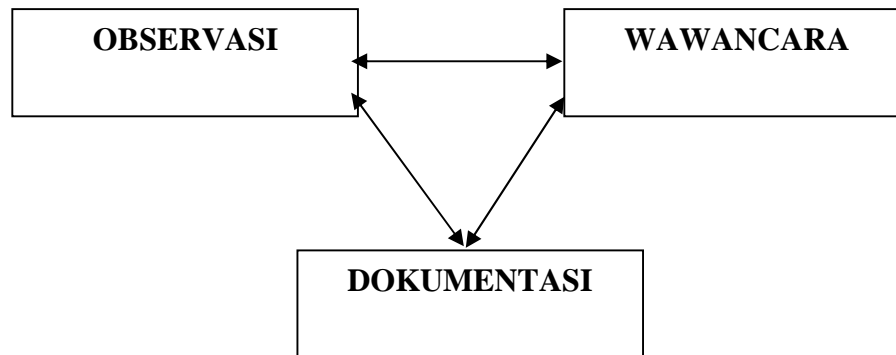
Bertujuan untuk meneliti kebenaran isi (data) sumber data itu. Dengan kritik intern ini penulis berusaha mendapatkan kebenaran sumber data dengan mengkaji beberapa faktor seperti adanya kesesuaian hasil wawancara dengan observasi dan penelitian yang penulis lakukan di lapangan.

### **b. Kritik ekstern**

Kritik ekstrn dilakukan untuk mendapatkan tingkat keaslian sumber data guna memperoleh keyakinan bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan sumber data yang tepat. Adapun terhadap sumber lisan peneliti melihat integritas informan pribadi, jabatan, dan keterlibatan informan dalam pelaksanaan program pendidikan inkusi dan penyediaan akses.

## **2. Triangulasi**

Menggunakan triangulasi (*triangulation*) dengan jenis triangulasi teknik yaitu teknik menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi sendiri merupakan penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang akan diteliti. Sehingga untuk mengetahui keautentikan data dapat dilihat dari sumber data yang lain atau saling mengecek antara sumber data yang satu dengan yang lain. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.1. Triangulasi Menurut Denzin

## F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu :

### 1. *Editing*

Editing adalah langkah pertama dalam menyusun data yang sudah dikumpulkan dari lapangan.

### 2. *Tabulating dan Coding*

Tahap tabulasi adalah tahap mengelompokkan jawaban-jawaban yang serupa, teratur, dan sistematis. Tahap ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data-data yang serupa dan sesuai secara sistematis. Data-data yang telah diperoleh dari lapangan kemudian disusun ke dalam bentuk table dan diberi kode oleh peneliti.

### 3. *Intepretasi Data*

Tahap intepretasi data yaitu tahapan peneliti untuk memberikan penafsiran atau penjabaran dari data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya yang lebih luas

dengan menghubungkan data dengan hasil yang lain, serta hasil dari data-data lain yang sudah dikumpulkan.

## **G. Teknik Analisis Data**

Dalam teknik analisis data kualitatif ini terdapat tiga komponen analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### **1. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Dalam tahapan reduksi data peneliti memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting dalam penelitian. Kemudian melakukan analisis menajam, menggolongkan, mengarahkan penelitian terhadap indikator-indikator yang sudah dibuat sebelumnya.

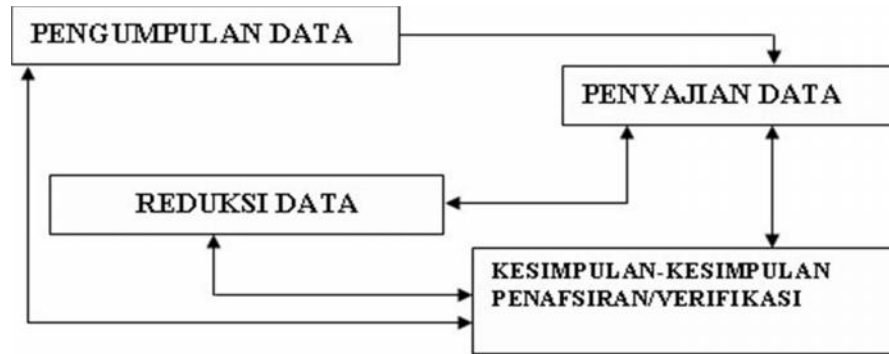
### **2. Penyajian Data (*Data Display*)**

Tahap kedua adalah penyajian data, data yang sudah disusun dan dikelompokkan adalah data-data yang didapat dari lapangan. Dalam penyajian data informasi-informasi yang sudah disusun ditarik sebuah kesimpulan dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan.

### **3. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)**

Tahapan selanjutnya mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. :



Gambar 3.2 Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman

## H. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini pada hakekatnya merupakan suatu persiapan atau rencana yang sistematis agar tujuan penelitian dapat tercapai sesuai dengan rencana. Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.

### 1. Persiapan Pengajuan Judul

Sebagai langkah awal dalam penelitian ini penulis mengajukan judul yang terdiri dari dua alternatif pilihan kepada dosen pembimbing akademik. Setelah salah satu judul mendapat persetujuan dari dosen pembimbing akademik, selanjutnya penulis mengajukan judul tersebut kepada Ketua Program Studi PPKn pada tanggal 16 Oktober 2015.

## **2. Penelitian Pendahuluan**

Setelah mendapat surat izin penelitian pendahuluan dari Dekan FKIP Universitas Lampung No. 7531/UN26/3/PL/2015. Peneliti melakukan penelitian pendahuluan di SMP Negeri 14 Bandar Lampung. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Wakil Kepala SMP Negeri 14 Bandar Lampung untuk mengetahui pelaksanaan program pendidikan inklusi dan observasi data jumlah peserta didik inklusi di SMP 14 Bandar Lampung. Data yang diperoleh dari penelitian pendahuluan tersebut kemudian menjadi gambaran umum tentang hal-hal yang akan diteliti dalam rangka menyusun proposal penelitian. Penelitian ini ditunjang dengan beberapa literatur dan arahan dari dosen pembimbing. Pada tanggal 30 Desember 2015 disetujui oleh Pembimbing I untuk melaksanakan seminar prosposal yang kemudian disahkan oleh Ketua Program Studi PPKn. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan masukan-masukan saran dari dosen pembahas untuk kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini.

## **3. Pengajuan Rencana Penelitian**

Rencana penelitian diajukan untuk mendapatkan persetujuan setelah dilaksankannya seminar proposal. Setelah melalui proses konsultasi dan perbaikan-perbaikan proposal skripsi dari Pembimbing I dan II maka seminar proposal dilakukan pada tanggal 19 Februari 2016. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah perbaikan dengan proposal skripsi dengan komisi pembimbing, komisi pembahas, Ketua Program Studi PPKn, dan koordinator seminar.

## **V. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dapat diuraikan sebagai berikut:

Proses pembelajaran yang berjalan di SMP Negeri 14 Bandar Lampung saat ini masih menggunakan program pembelajaran yang sama diberlakukan untuk semua peserta didik. Guru menggunakan metode dan pendekatan yang sama kepada setiap peserta didik dan tidak menggunakan media pembelajaran khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Model kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi pada dasarnya menggunakan kurikulum reguler. Di SMP Negeri 14 Bandar Lampung belum tersedia Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang berperan sebagai guru yang berkompeten dalam mengelola anak berkebutuhan khusus. Sedangkan guru kelas atau guru mata pelajaran yang ada saat ini belum pernah mendapatkan pelatihan, seminar, workshop atau bimbingan teknis tentang pendidikan inklusi. Peran serta GPK sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi dibantu bersama-sama dengan guru kelas maupun guru mata pelajaran. Sarana dan prasarana yang tersedia juga belum memadai. Sarana dan prasarana merupakan perangkat yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi pada satuan pendidikan.

Pemerintah perlu mengalokasikan dana secara khusus untuk memenuhi sarana dan prasarana, kelengkapan sumber dan media pembelajaran agar pelaksanaan pembelajaran pendidikan inklusi dapat berjalan dengan seoptimal mungkin. Sumber pembiayaan pendidikan inklusi di SMP Negeri 14 Bandar Lampung berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sumbangan orang tua siswa. Dana selama ini dimanfaatkan untuk pengadaan aksesibilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Sekolah perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait penyelenggaraan pendidikan inklusi agar pelaksanaan pendidikan inklusi bisa berjalan dengan optimal.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan, agar pelaksanaan program pendidikan inklusi di SMP Negeri 14 Bandar Lampung dapat terselenggara dengan baik, sesuai dengan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 yaitu memberikan layanan pendidikan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya, maka peneliti merumuskan beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan**

Pemerintah diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam mendukung implementasi sistem pendidikan inklusi terutama bagi Pemerintah Daerah.



Walaupun kebijakan pendidikan inklusi berasal dari pemerintah pusat tetapi pengelolaan pendidikan inklusi di tingkat satuan pendidikan menjadi wewenang pemerintah daerah. Peran Pemerintah daerah yang dalam hal ini Dinas Pendidikan yang diharapkan melakukan bimbingan kepada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, melakukan sosialisasi yang lebih aktif baik kepada sekolah-sekolah maupun kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi, mengadakan pendidikan dan latihan, *workshop*, seminar, dan bimbingan teknis untuk guru reguler serta menyalurkan anggaran ke yang berhak menerima untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di sekolah inklusi.

## 2. Bagi Sekolah

SMP Negeri 14 Bandar Lampung diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Peran yang dapat ditingkatkan antara lain, guru harus profesional dan memiliki uji kompetensi dalam mendidik anak berkebutuan khusus, melakukan assesmen untuk mengetahui hambatan serta keunggulan siswa dengan bekerja sama dengan tenaga ahli seperti psikolog, mensosialisasikan program pendidikan inklusi kepada masyarakat luas agar semua peserta didik yang memiliki hambatan dapat terlayani dengan baik, berperan aktif untuk mengikuti guru reguler seperti *workshop*, seminar, bimbingan teknis serta pelatihan khusus untuk meningkatkan pemahaman guru tentang pendidikan inklusi, memberikan layanan kepada peserta didik

berkebutuhan khusus secara berkelanjutan, merancang kurikulum yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi dan Cepi Abdul Jabar, Safrudin. (2009). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arum, W.S.A. 2005. *Perspektif Pendidikan Luar Biasa dan Implikasinya bagi Penyiapan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Dirjen Dikti
- Budiyanto, 2005. *Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal*. Jakarta: Dirjendikti Depdiknas.
- Bungin, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1991), Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa, Jakarta: Balai Pustaka
- Direktorat Pendidikan Luar Biasa, 2007. *Pedoman Umum Pendidikan Inklusi*. Jakarta.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2010. *Pedoman Manajemen dan Pembelajaran Sekolah Inklusi*. Jakarta
- Gulu, W. 2002. *Strategi Belajar-Mengajar*. Jakarta: Gramedia.
- J. Moleong, Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; Remaja Rosdakarya
- Kustawan, Dedy. 2012. *Pendidikan Inklusif dan Upaya Implementasinya*. Jakarta: Luxima
- Kustawan, Dedy. 2012. *Manajemen Pendidikan Inklusi*. Jakarta: Luxima
- Lay Kekeh Marthan. 2007. *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta: DIRJEN DIKTI.
- Mantja. W, 2005. *Etnografi Desain Penelitian Kualitatif dan Manajemen Pendidikan*. Malang: Wineka Media
- Miles, B.M., dan Huberman, A.M, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Rohadi, R.T. Jakarta: Universitas Indonesia.

- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan–Analisis Kebijakan–Proses*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pemerintah Republik Indonesia, (2003), Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Permendiknas. (2009). Nomor 70 Tahun 2009. Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Anak Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Khusus. Jakarta: Depdiknas.
- Riant Nugroho dan H.A.R Tilaar. 2008. *Kebijakan Pendidikan*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar.
- Rae, Leslie, 1990, *Mengukur Efektivitas Pelatihan*, Jakarta, PT Pustaka Binaman Pressindo
- S. Eko Putro Widoyoko. (2010). *Evaluasi Program Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Smith, J.David, 2009. *Inklusi, Sekolah Ramah untuk Semua*, Penerjemah Denis, Ny. Enrica. Bandung: NUANSA
- Sugiyono. (2010). *Model Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung : Alfabeta
- Suryabrata, Sumadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- Sugiarman, M dan Mif Baihaqi, 2009, *Inklusi, Sekolah Ramah untuk Semua*. Bandung: Nuansa.
- Tarmansyah. (2007). *Inklusi : Pendidikan Untuk Semua*. Jakarta: Depdiknas.
- Universitas Lampung. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Bandar Lampung: UNILA
- Wiramihardja, Sutardjo A, 2015. *Pengantar Psikologi Abnormal*. Bandung: PT. Refika Aditama